



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 30 Januari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KOTA DENPASAR
UNIT KERJA : SEKRETARIAT DAERAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : IDA BAGUS ALIT ADHI MERTA
2. Jabatan : ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
3. NHK : 431878

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **425.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 350 m2/160 m2 di KAB / KOTA TABANAN, Rp. 150.000.000
2. Tanah Seluas 850 m2 di KAB / KOTA TABANAN, HASIL SENDIRI Rp. 55.000.000
3. Tanah Seluas 400 m2 di KAB / KOTA TABANAN, HASIL SENDIRI Rp. 20.000.000
4. Tanah Seluas 109 m2 di KAB / KOTA KOTA DENPASAR , HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **674.000.000**

1. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2005, HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000
2. MOBIL, NISSAN JEEP Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 295.000.000
3. MOBIL, HONDA GN5C CITY HB 1.5L RS-SEN CVT Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 345.000.000
4. MOTOR, HONDA M1K03Q33LO A/T Tahun 2025, HASIL SENDIRI Rp. 31.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp.** **130.000.000**

D. SURAT BERHARGA **Rp.** **---**

E. KAS DAN SETARA KAS **Rp.** **32.458.059**



F. HARTA LAINNYA

Rp. 327.309.250

Sub Total

Rp. 1.588.767.309

III. HUTANG

Rp. 379.191.445

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 1.209.575.864

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.